KR-Antara/Anis Efizudin

BENCANA TANAH BERGERAK: Sejumlah relawan memeriksa lokasi bencana tanah bergerak di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Desa Ratamba, Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (28/1/2025). Bencana tanah bergerak yang terjadi sejak (22/1/2025) itu menyebabkan jalan raya ambles sedalam 1,5-2 meter sehingga Jalur Banjarnegara-Dieng lewat Pejawaran putus total, sedikitnya 15 rumah rusak parah dan 60 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.

MILIKI PASPOR NEGARA LAIN

Paulus Tannos Masih Berstatus WNI

JAKARTA (KR) - Buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin masih berstatus warga negara Indonesia (WNI). Pasalnya, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga Tannos tidak serta merta mendapatkan kewarganegaraan lain meski memiliki paspor di negara lain.

"Yang bersangkutan memang memiliki paspor negara sahabat. Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ungkap Menkum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Rabu (29/1).

Menkum mengatakan, Tannos sudah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, prosesnya belum selesai karena sampai saat ini Tannos belum melengkapi dokumen. Sampai tahun 2018, paspor Tannos masih berstatus WNI dan masih atas nama Thian Po Tjhin.

Hingga hari ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat ekstradisi Tannos. Batas waktu pemerintah Indonesia mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen ke otoritas Singapura selama 45 hari, yang akan berakhir pada tanggal 3 Maret 2025. Pemerintah Indonesia dapat memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu yang lebih cepat.

Menkum meyakini proses pengajuan ekstradisi Indonesia terhadap Tannos berjalan lancar meski Tannos memiliki paspor Republik Guinea-Bissau.

"Pemerintah Singapura sudah sangat kooperatif dengan permintaan yang dilakukan oleh teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sehingga yang bersangkutan sekarang sudah ditahan," katanya.

Saat ditanya mengenai percepatan proses ekstradisi agar tidak didahului oleh pemerintah Guinea-Bissau, Menkum mengaku hal tersebut merupakan langkah teknis dari proses pengajuan ekstradisi, yang merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri RI. **(Ant/Has)**

JIKA INGIN KEPERCAYAAN NAIK

Publik Menunggu Perubahan DPR

JAKARTA (KR) - Publik saat ini menunggu perubahan-perubahan nyata jika DPR RI ingin tingkat kepercayaan di masyarakat naik. Berdasarkan Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dikeluarkan 27 Januari lalu, tingkat kepercayaan terhadap DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga.

Sedangkan Presiden menjadi lembaga yang sangat dipercayai karena berada di peringkat pertama.

"Bukan jargon yang ditunggu publik seperti jargon DPR Modern. Publik menunggu perbaikan tata kelola yang berujung pada peningkatan kinerja dengan hasil yang memadai," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Jakarta, Rabu (29/1).

Ia menilai, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR yang berada di posisi paling rendah tentu bukan kabar yang mengejutkan. Menurutnya, kepercayaan publik DPR yang rendah pada survei terakhir tidak spesifik merujuk pada DPR periode 2024-2029 saja, tetapi masih berkaitan dengan periode-periode sebelumnya.

"Dengan kata lain pergantian periode DPR setiap lima tahun sekali sama sekali tidak berdampak pada perubahan citra dan kinerja DPR secara kelembagaan," jelas Lucius.

Ia menyebutkan, sejak era reformasi, DPR memiliki kewenangan sangat besar yang seharusnya dijadikan sebagai episentrum perubahan. Faktanya, kekuasaan atau kewenangan besar yang dimiliki berbanding terbalik dengan kinerja dan citra lembaga yang terlihat buruk.

Menurut Lucius, hal yang berkontribusi bagi buruknya kepercayaan publik terhadap DPR adalah kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran hingga pengawasan. Beragam faktor integritas anggota serta kebijakan internal DPR, kerap memantik kritikan publik yang menimbulkan antipati.

"DPR sebagai wakil rakyat terlihat tinggal sebagai jargon. Karena dalam banyak isu publik, DPR justru mengabaikan rakyat dan bersekutu dengan elit," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, publik menunggu komitmen nyata DPR untuk menunjukkan fungsi perwakilan mereka dengan melibatkan rakyat secara bermakna dalam setiap pembahasan regulasi. "Komitmen DPR untuk menjadi lembaga penonton kinerja pemerintah jangan sampai dipakai justru untuk bersekongkol dengan pemerintah," katanya. **(Ant)-f**

GUS DUR GAGAS LIBUR IMLEK

Layak Pahlawan Nasional

JAKARTA (KR) - Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur. Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek.

Kemudian hal itu dilanjutkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. "Keppres No 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan, Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia," kata Neng Eem di Jakarta, Rabu (29/1).

Neng Eem mengatakan, perjuangan Gus Dur mengenai Imlek sesuai amanat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yakni setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

Keppres yang mencabut larangan perayaan Imlek itu, menurutnya, telah berhasil menunjukkan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran. **(Ant)-f**

UNTUK GERAKAN MAKAR NON-SENJATA

44.000 Napi Tunggu Amnesti

JAKARTA (KR) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengampunan (amnesti) untuk narapidana (napi) yang akan diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto ditujukan kepada kelompok terduga gerakan makar nonsenjata. Saat ini Kemenkum telah memiliki 44.000 nama napi yang akan diajukan untuk menerima amnesti dari Presiden dan masih terus memverifikasi nama-nama tersebut.

Pernyataan tersebut merespons adanya rencana pemberian amnesti terhadap napi terkait dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. "Kalau rencana, ya bisa saja, itu bisa saja. Akan tetapi, yang kami proses sekarang itu tidak termasuk yang gerakan bersenjata," ungkap Menkum di Jakarta, Rabu (29/1).

Apabila nantinya terdapat usulan pemberian amnesti terhadap KKB, hal tersebut akan kembali lagi kepada Presiden lantaran amnesti merupakan prerogatif kepala negara. Meski terdapat banyak nama, belum ada nama napi KKB dalam daftar 44.000 napi yang saat ini sedang diverifikasi untuk menerima amnesti.

Setelah verifikasi selesai, pihaknya akan mengirimkan puluhan ribu nama itu kepada Presiden Prabowo. "Kami sepakat bahwa untuk saat ini bagi gerakan bersenjata itu tidak dilakukan pengajuan amnesti kepada Presiden," kata Menkum.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan (amnesti) bagi narapidana terkait dengan KKB di Papua sebagai upaya baru dalam menciptakan perdamaian di Tanah Papua. "Kami menilai langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada tahanan politik asal Papua merupakan pendekatan baru dalam upaya menciptakan perdamaian di Papua," katanya di Jakarta, Rabu.

Legislator asal Papua Selatan ini juga menilai langkah tersebut bisa menjadi pintu pembuka untuk mengakhiri konflik bersenjata secara permanen di Bumi Cendrawasih. Namun Indrajaya mengingatkan langkah mewujudkan perdamaian abadi di Tanah Papua tidak boleh berhenti pada sekadar pemberian amnesti saja. Dalam waktu dekat, pemberian amnesti harus diikuti dengan jalan dialog kemanusiaan pemerintah dengan pemangku kepentingan di Papua. **(Ant/Has)-f**

ISU PENGHENTIAN PINJAMAN AS

RI Tunggu Komunikasi Resmi

JAKARTA (KR) - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan, Indonesia hanya akan memberikan tanggapan melalui komunikasi resmi mengenai isu penghentian hibah dan pinjaman Amerika Serikat yang diumumkan oleh Gedung Putih.

"Indonesia hanya akan memberikan tanggapan berdasarkan komunikasi yang disampaikan secara resmi, melalui saluran diplomatik ataupun saluran resmi lainnya, yang dibahas antarlembaga Pemerintah kedua negara," kata Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (29/1).

Rolliansyah menegaskan, Pemerintah RI tidak akan melakukan spekulasi tentang isu apapun yang masih bersifat pernyataan generik dari Pemerintah negara lain yang tidak secara khusus ditujukan kepada Indonesia.

Sebagaimana dilaporkan oleh Anadolu, Kantor Anggaran dan Manajemen Gedung Putih mengeluarkan perintah untuk menghentikan sementara semua hibah dan pinjaman federal, menurut sebuah memorandum internal yang dikirim pada Senin.

"Dalam Tahun Anggaran 2024, dari hampir 10 triliun dolar AS (Rp 162.346 triliun) yang dibelanjakan oleh Pemerintah Federal, lebih dari 3 triliun dolar AS (Rp 48.705 triliun) dialokasikan untuk bantuan keuangan federal, seperti hibah dan pinjaman," demikian isi memorandum tersebut.

Gedung Putih menuliskan, bantuan keuangan seharusnya digunakan untuk memajukan prioritas pemerintahan, mengalokasikan pajak secara efektif demi Amerika yang lebih kuat dan lebih aman, mengurangi beban inflasi bagi warga negara, hingga meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan menjadikan Amerika lebih sehat kembali.

Menurut dokumen itu, penghentian juga berlaku untuk kegiatan lembaga lainnya yang mungkin terkait dengan perintah eksekutif, namun tidak terbatas pada bantuan keuangan untuk bantuan luar negeri, Organisasi Nonpemerintah (NGO), program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), ideologi gender, serta Green New Deal.

"Penghentian sementara ini akan memberikan waktu bagi pemerintahan untuk meninjau kembali program lembaga dan menentukan penggunaan dana yang paling sesuai dengan hukum serta prioritas Presiden," tambahnya. **(Ant/San)**

JANGAN LEWATKAN! BRI UMKM EXPO(RT) & MICROFINANCE OUTLOOK 2025

Digelar 30 Januari - 2 Februari di ICE BSD

JAKARTA (KR) - Mengusung tema *"Broadening MSME's Global Outreach,"* alias Memperluas Jangkauan Global UMKM, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 hadir di ICE BSD City Tangerang pada 30 Januari s.d 2 Februari 2025. Tak ketinggalan, pada 30 Januari, BRI juga turut menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini dengan menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Menghadirkan beragam panggung hiburan dari musisi papan atas tanah air, pada *event* ini ribuan UMKM lokal siap memamerkan produk terbaiknya.

Gelaran yang memasuki tahun ke-6 ini menjadi momentum strategis bagi BRI untuk terus mendukung UMKM naik kelas, terutama melalui peningkatan kapabilitas agar mampu bersaing di pasar internasional.

Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan bahwa UMKM memegang peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional. "Kami percaya, dengan memperluas akses pasar global bagi UMKM, kita akan menciptakan surplus neraca jam kerja yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," ujarnya.

Seiring dengan semangat perseroan, para pelaku UMKM pun nyatanya menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh. Sebagai bukti, pada tahun ini jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 mengalami peningkatan. Bahkan, sebanyak 1.000 UMKM terbaik berhasil lolos seleksi ketat yang berlangsung pada 4 November - 7 Desember 2024, meningkat sebesar 42,86% dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan banyaknya peserta, tetapi juga kualitas UMKM yang semakin siap untuk menembus pasar global. Tahun ini, UMKM terpilih akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).

Lebih lanjut, pelaksanaan BRI EXPO(RT) UMKM 2025 tahun ini turut menghadirkan rangkaian acara menarik untuk diikuti, terlebih dapat mempertemukan UMKM dengan potential buyers. Acara ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan pengalaman langsung melalui berbagai kegiatan, seperti UMKM Expo, *Partner Gathering, Talkshow*, dan Workshop.

Bahkan, sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, Sunarso juga mengungkapkan adanya kolaborasi antara BRI dan Kementerian Perdagangan, di mana mulai tahun 2025, akan diadakan *business matching* terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor.

Selanjutnya, acara ini juga menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, seperti kompetisi Indonesia Barista Championship dan Indonesia Brewers Cup oleh Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), Fashion Show hingga *Indonesia Culinary Festival*.

Untuk makin memeriahkan acara, BRI pun menghadirkan *special performances* dari sejumlah musisi papan atas seperti Juicy Luicy, Bernadya, Tulus, Lyodra, Maliq & D'essentials, Sal Priadi, Ghea Indrawari, hingga Andmesh yang dapat ditonton secara gratis oleh seluruh pengunjung.

Tidak ketinggalan, pada 30 Januari 2025 BRI turut menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema *"Empowering the People's Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth"* yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat. Acara ini akan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, termasuk para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator.

BRI Microfinance Outlook 2025 ini juga akan menghadirkan berbagai narasumber terkemuka, seperti Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Rachmat Pambudy, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park. Selain itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi dan Harsha Rodrigues sebagai Head of Regional Client Services at Women's World Banking akan berbagi pandangan tentang bagaimana memperkuat keuangan inklusif. **(*)**

KR - Istimewa

BRI UMKM EXPO(RT) & Microfinance Outlook 2025 menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri, beragam panggung hiburan dan pameran produk UMKM lokal.